



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN

(LKjIP) KECAMATAN SUSUKAN

TAHUN 2025

KABUPATEN CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

TAHUN 2026

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Susukan Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Kecamatan Susukan Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Susukan, Februari 2026

Camat Susukan,



AUGUST PENTRIST/ANTO, SSTP.

Pembina Tk. I

NIP. 19750812 199603 1 002

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Susukan Tahun 2025 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Kecamatan Susukan yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Kecamatan Susukan Tahun 2019-2025, Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan prestasi kinerja Kecamatan Susukan yang dihasilkan di Tahun 2025, dapat digambarkan sebagai berikut:

Tujuan “Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik” dengan Indikator kinerja, Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintah tingkat Kecamatan. persentase capaian kinerja sampai dengan akhir bulan Desember 2025 adalah 79,00%

Setelah Tujuan ditetapkan maka sasaran yang menjadi tanggungjawab Kecamatan Susukan dalam mencapai target kinerja ada sebagai berikut:

Sasaran OPD 1: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan dengan indikatornya Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat, Persentase capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2025 adalah 100 %

Sasaran OPD 2: Meningkatnya Penyelenggaraan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Koordinasi Ketertiban Umum, dengan indikatornya Persentase Jumlah Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Umum dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan, Persentase capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2025 adalah 96 %.

Sasaran OPD 3 Meningkatnya Status Kemajuan dan Kemandirian Desa, dengan indikatornya Indeks Desa Membangun (IDM), Persentase capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2025 adalah 70 Poin

Di luar indikator sasaran strategis, pencapaian kinerja Kecamatan Susukan juga ditunjukkan oleh pencapaian target terkait dengan sasaran program sebagai berikut:

- a.** Sasaran Program 1: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikatornya Meningkatnya Prosentase Kepatuhan dalam Pelaksanaan SOP Pelayanan Pemerintah, persentase capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2025 adalah 100 %.
- b.** Sasaran Program 2: diantaranya:
 - 1.** Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan indikatornya Prosentase Peningkatan Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik, persentase capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2025 adalah 100 %.

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, dengan indikatornya Prosentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan yang dilakukan, persentase capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2025 adalah 100 %.
 3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum, dengan indikatornya Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilakukan. persentase capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2025 adalah 100 %.
- c. Sasaran Program 3 : Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dengan indikator Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, persentase capaian kinerja sampai dengan akhir bulan Desember 2025 adalah 0.00 %, Karna program ini tidak didukung dengan anggaran.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Kecamatan Susukan kedepan, sebagai berikut:

1. Tingkat Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan yang diberikan oleh Kecamatan Susukan harus dipertahankan dan ditingkatkan agar masyarakat puas terhadap pelayanan yang diberikan.
2. Masih belum menguasai Aparatur pemerintah Desa tentang Penyusunan Dokumen RKPDes dan APBDes yang tepat waktu.
3. Masih belum tertibnya laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran, baik anggaran Dana Desa, Bantuan Keuangan Provinsi, Alokasi Dana Desa, serta Pendapatan Asli Desa.
4. Masih belum tertibnya penataan Aset Desa.
5. di Kecamatan Susukan ada 10 Desa, 4 Desa berstatus Desa Mandiri dan 5 Desa bersatus maju dan 1 Desa bersatus berkembang, hal ini menjadikan motivasi untuk Kecamatan Susukan agar bisa menaikkan status Desa diwilayah Kecamatan Susukan menjadi desa mandiri.

KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Cascading Kinerja dan Struktur Organisasi	1
1.2 Fungsi dan Tugas	5
1.3 Isu-isu Strategis	5
1.4 Dukungan SDM, Sarana dan Prasarana dan Anggaran	6
1.5 Tindaklanjut LHE SAKIP	10
1.6 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	11
BAB 2 PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA	13
2.1 Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja	13
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	26
2.3 Struktur Program dan Kegiatan	27
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	31
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	36
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025	36
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	41
3.2.1 Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	41
3.2.2 Sasaran Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Ketertiban Umum di Kecamatan	46
3.2.3 Sasaran Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat	51
BAB 4 PENUTUP	56
4.1. Kesimpulan	56
4.2. Langkah Perbaikan Kinerja	56

BAB 1 PENADAHULUAN

Bab 1 Berisi :

1. Cascading Kinerja dan Struktur Organisasi
2. Fungsi dan Tugas
3. Isu Strategis
4. Dukungan SDM' Sarana Prasarana dan Anggaran
5. Tindaklanjut LHE SAKIP
6. Sistematis SAKIP

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Susukan Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

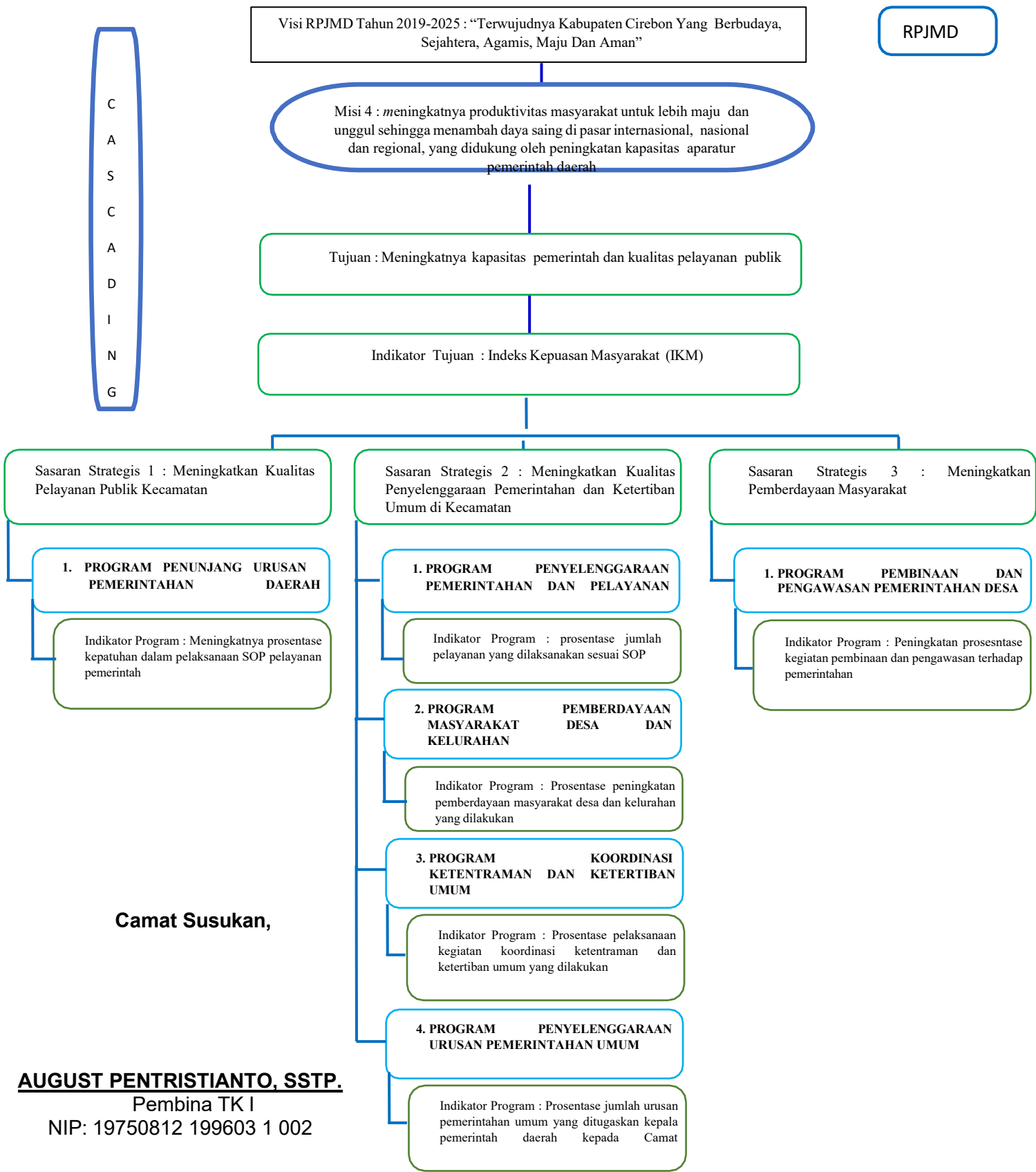
Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Susukan Tahun 2025 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Kecamatan Susukan.
2. Mendorong Kecamatan Susukan didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kecamatan Susukan untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Kecamatan Susukan didalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.1 Cascading Kinerja dan Struktur Organisasi Sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

Dalam Menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi kecamatan Susukan berpedoman pada Rencana Strategis 2019-2025 dalam menjalankan Program dan Kegiatan yang tertuang dalam Cascading kinerja kecamatan Susukan sebagai berikut:

Gambar 1.1Cascading / Pohon Kinerja



Kecamatan Susukan dibentuk berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
2. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon.
3. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 159 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan.

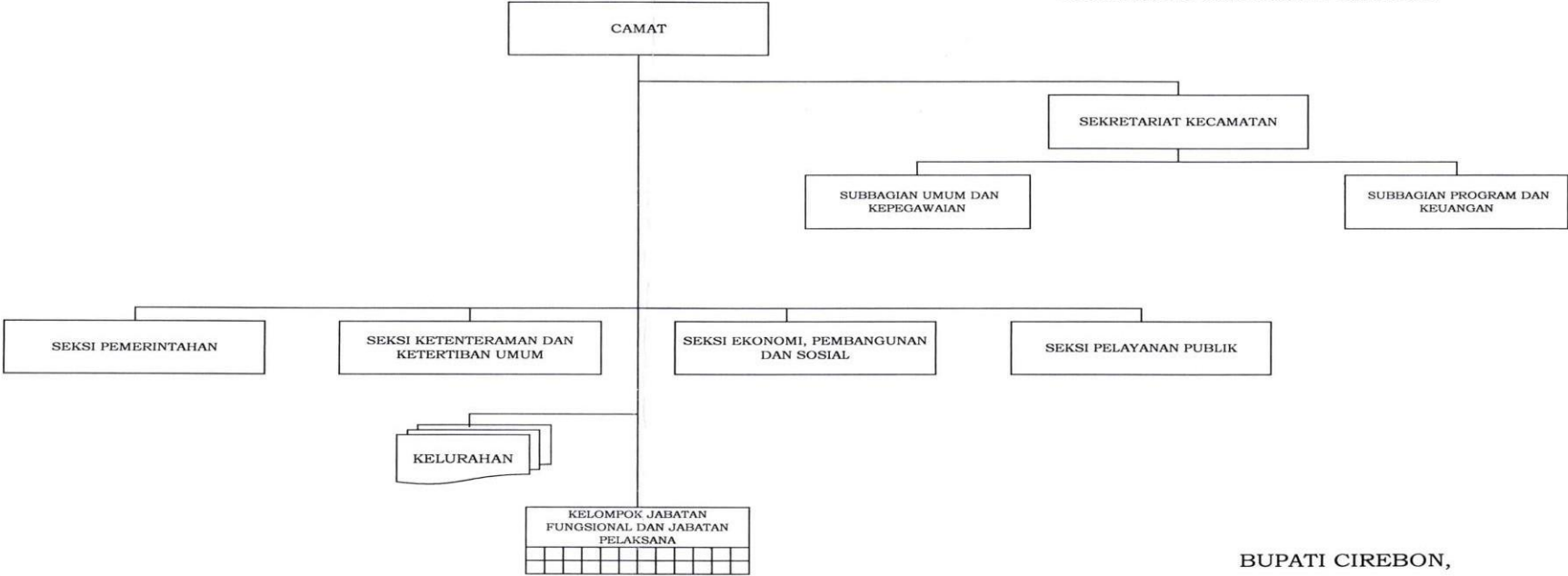
Tugas, fungsi dan struktur organisasi Kecamatan di Kabupaten Cirebon ditetapkan dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 159 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dilingkup Kecamatan, antara lain :

Susunan dan struktur organisasi Kecamatan Susukan, terdiri atas;

1. Camat
2. Sekretariat Kecamatan, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Program dan Keuangan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Seksi Ekonomi Pembangunan dan Sosial
6. Seksi Pelayanan Publik
7. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana
8. Kelurahan / Desa

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN**

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 159 TAHUN 2023
TANGGAL : 14 DESEMBER 2023
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
KECAMATAN KABUPATEN CIREBON



Diundangkan di Sumber
pada tanggal 14 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,
HILMY RIVAI
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 159

BUPATI CIREBON,
Ttd
IMRON

1.2. Fungsi dan Tugas

Sesuai Peraturan Bupati Cirebon Nomor 159 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan mempunyai Fungsi dan Tugas sebagai berikut:

1. Fungsi

- 1) Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
 - b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah lain di tingkat kecamatan;
 - g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
 - h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah lain yang ada di kecamatan;
 - i. pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan;

2. Tugas

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan.

1.3 Isu-isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Kecamatan Susukan, antara lain sebagai berikut:

1. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah Desa dan belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah Kurangnya Luasan Ruang Terbuka Hijau

2. Pemutakhiran data yang kurang akurat untuk mengembangkan perencanaan pembangunan
3. Masih rendahnya kinerja dan akuntabilitas aparatur desa
4. Masih kurangnya pelayanan publik terhadap masyarakat sehingga masyarakat belum puas
5. Pemutakhiran data penerima bantuan yang kurang akurat
6. Kurangnya pegawai yang berstatus PNS di Kantor Kecamatan Susukan

1.4 Dukungan SDM, Sarana Prasarana, dan Anggaran

Pegawai Kecamatan Susukan berjumlah sebanyak 16 orang Pegawai Negeri Sipil, yang memiliki keterampilan memadai yang merupakan potensi sumber daya manusia (SDM) sebagai pendukung organisasi dalam melaksanakan fungsi dan tugas yang cukup strategis dalam urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.

Tabel Distribusi Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut Jabatan
Tahun 2025

No	Jabatan	Pegawai yang ada		Jenis Kelamin	
		Jumlah	Kualifikasi	Laki-laki	Perempuan
1	Camat	1	S1	1	-
2	Sekretaris Camat	1	S1	1	-
3	Kepala Seksi	4	S1	4	-
4	Kepala Sub Bagian	2	S1	2	-
5	Pelaksana PNS	1	S1	1	-
6	Pelaksana PNS	1	SMA	1	-
7	Pelaksana PPPK	1	S1	1	-
8	Pelaksana PPPK	2	SMA	1	1
9	Pelaksana PPPK PW	3	S1	3	
10	Pelaksana PPPK PW	1	SMA	1	
TOTAL		17		16	1

Tabel Distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kecamatan Susukan Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Master (S2)			
2	Sarjana (S1)	13	-	13
3	Diploma (D3/D4)	-	-	-
4	SLTA	3	1	4
5	SMP	-	-	-
TOTAL		16	1	17

Tabel Distribusi Tenaga Non PNS Kecamatan Susukan Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Sarjana (S1)	-	-	-
2	Diploma (D3/D4)	-	-	-
3	SLTA	-	-	-
TOTAL		-	-	-

Tabel Distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) Menurut Pangkat/Golongan di Kecamatan Susukan Tahun 2025

NO	GOLONGAN	Laki-Laki	Perempuan	JUMLAH
1	IV B	1	-	1
2	IV A	-	-	-
3	III D	2	-	2
4	III C	5	-	5
5	III B	1	-	1
6	III A	1	-	1
7	II D	-	-	-
8	II C	-	-	-
9	II B	-	-	-
10	II A	3	-	3
TOTAL		13		13

Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Susukan memiliki dukungan sarana dan prasarana perkantoran diantaranya Bangunan Gedung Kantor, Komputer, Printer, Meja Kerja, Kursi, Leptop, Filing cabinet, Dispenser, Musolah, Ruang Pelayanan Umum, dan lain lain dengan berbagai Kategori jenis Barang, ada yang kondisinya baik, rusak ringan, hingga rusak berat.

Data sarana/prasarana milik Kecamatan Susukan Tahun 2025.

No	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)
	Aset tetap		
1	Aset tetap	404	1.388.524.391,00
1.3	Bangunan parkir	6	1.398.368.920,00
1.4	Peralatan dan mesin	173	422.746.537,0
1.5	Alat kantor dan rumah tangga	107	208.834.655,00
1.6	Alat kantor	28	79.627.541,00
1.7	Alat penyimpan perlengkapan kantor	21	55.173.641,00
1.8	Alat kantor lainnya	7	24.453.900,00
1.9	Alat rumah tangga	66	92.577.114,00
1.10	Meubelair	55	60.420.114,00
1.11	Alat pembersih	1	2.157.000,00

1.12	Alat pendingin	4	16.405.000,00
1.13	Alat rumah tangga lainnya (home use)	4	13.595.000,00
1.14	Meja dan kursi kerja/rapat pejabat	13	36.630.000,00
1.15	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	1	762.931,00
1.16	Alat Kedokteran Dan Kesehatan.	1	866.300,00
1.17	Komputer unit	22	146.057.651,00
1.18	Peralatan komputer	8	37.249.000,00
2	Aset lain-lain		
2.1	Aset rusak berat/usang	8	44.919.563,00
	Jumlah		3.984.449.695,00

Anggaran

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Susukan Tahun 2025 berasal dari APBD Kabupaten Cirebon yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung, yang didukung oleh 4 (empat) program, 12 (Dua Belas) kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan. Pada anggaran murni Tahun 2025 Kecamatan Susukan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.2.740.560.700,0 dengan rincian belanja operasi sebesar Rp.2.441.767.700,0 yang didalamnya meliputi belanja pegawai sebesar Rp.2.094.989.200,00 dan belanja barang dan jasa Rp.346.778.500,00 dan juga terdapat anggaran untuk belanja modal sebesar Rp.298.793.000,00 Pada perubahan anggaran Tahun 2025 anggaran belanja Kecamatan Susukan menjadi Rp.2.902.118.700,00 dengan rincian belanja operasi sebesar Rp.2.603.325.700,00 yang didalamnya meliputi belanja pegawai sebesar Rp.2.222.487.200,00 dan belanja barang dan jasa Rp.380.838.500,00 dan juga terdapat anggaran untuk belanja modal sebesar Rp.298.793.000,00

Adapun rincian realisasi penggunaan anggaran Tahun 2025 dapat di lihat di dalam tabel ini.

Kode rek	Uraian	Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Bertambah / Berkurang
5.	BELANJA DAERAH	2.902.118.700,00	2.660.754.050,00	241.364.650,00
5.1.	BELANJA OPERASI	2.603.325.700,00	2.375.226.130,00	228.099.570,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	2.222.487.200,00	2.003.027.808,00	219.459.392,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	380.838.500,00	372.198.322,00	8.640.178,00
5.2.	BELANJA MODAL	298.793.000,00	285.527.920,00	13.265.080,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.793.000,00	25.793.000,00	-

5.2.03.	Gedung Dan Bangunan	273.000.000,00	259.734.920,00	13.265.080,00
	JUMLAH	2.902.118.700,00	2.660.754.050,00	241.364.650,00

1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

Pada Tahun 2024 Kecamatan Susukan, Catatan Hasil Evaluasi Riveu atas Evaluasi Laporan Auntabilitas Kinerja Intasi Pemerintah (AKIP) pada Kecamatan Susukan dengan Nilai 63,80 dengan Kategori baik, namun ada beberapa Saran/Rekomendasi temuan dalam rangka perbaikan kinerja namun sudah ditindak lanjuti dalam rangka perbaikan kinerja.

No	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
	Catatan Hasil Reviu Atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2024 pada Kecamatan Susukan	
1.	Menyusun Dokumen Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun Anggaran 2025	Dari Hasil Evaluasi AKIP terdapat 9 saran/rekomendasi dan seluruhnya telah ditindaklanjuti.
2.	Melakukan publikasi dokumen Perencanaan Kinerja pada : <ul style="list-style-type: none"> - laman/website milik Kecamatan Susukan - SAKIP Kabupaten Cirebon - E-SAKIP REVIU milik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 	
3.	Belum Menyusun diagram crosscutting	
4.	Melengkapi bukti dukung dengan hasil rapat/notulen pelaksanaan pengukuran capaian kinerja	
5.	Menyusun SOP Pengumpulan dan Pengukuran Data Kinerja	
6.	Melampirkan bukti penyerahan LKIP kepada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Cirebon	
7.	Melengkapi Dokumen Laporan Kinerja dengan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah	
8.	Melengkapi bukti dukung dengan hasil rapat/notulen pelaksanaan penyusunan dokumen Laporan Kinerja yang melibatkan seluruh pegawai.	
9.	Melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilengkapi dengan pernyataan pimpinan bahwa telah direviu secara internal, formulir checklist reviu dan SK Tim Reviu Internal	

1.6 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Susukan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif memuat:

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKIP/manfaat LKIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup, Potensi yang menjadi ruang lingkup PD dan Sistematika penulisan LKIP.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai perencanaan strategis, perjanjian kinerja, dan rencana anggaran. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Pada bagian disajikan pula perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional/sejenis.

Akuntabilitas keuangan dipaparkan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi penggunaan sumber daya.

Dalam mencapai sasaran organisasi yang diharapkan, perangkat daerah juga telah melakukan inovasi. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas.

Perangkat daerah dalam mencapai sasaran organisasi yang diharapkan selain melakukan inovasi juga didukung kolaborasi lintas sektor. Dengan adanya kolaborasi lintas sektor tersebut sasaran dapat dicapai lebih optimal sehingga dapat mewujudkan pertanggungjawaban yang terpadu dan komprehensif.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

BAB 2
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Tujuan , Sasaran dan Indikator Kinerja

Bab 2 Berisi :

- 1. Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja
- 2. Steragi arah Kebijakan
- 3. Struktur Program dan Kegiatan
- 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- 5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja Tahun 2025

Memasuki Tahun terakhir peride Renstra 2025-2026, Kecamatan Susukan menyusun Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2026. Renstra Kecamatan Susukan merupakan manifestasi komitmen Kecamatan Susukan dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cirebon yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Kecamatan Susukan Tahun 2019-2025 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2014-2019).

Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi dan Misi Kepala Daerah di tuangkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Cirebon merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2026, berikut ini adalah Tabel Visi Misi Kepala Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026:

**Visi Misi Kepala Daerah Visi misi dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya
dituangkan dalam bagan alur *cascade* RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026**

No	Visi & Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kondisi Awal		Target tahun		Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	VISI: -							
1	-							
1.1		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Produktivitas Daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan	Kinerja: Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi, Tolok Ukur: Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Rumus Perhitungan: Perhitungan BPS	4,85 Persen	5,08	5,30	5,70	5,70
1.1.1		Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Sektor Unggulan	Kinerja: Meningkatnya pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Tolok Ukur: Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Rumus Perhitungan: (PDRB sektorSektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tahun n - PDRB sektor Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tahun n-1)/PDRB sektor Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tahun n-1 * 100	-2,13 Persen	4,41	4,63	4,86	4,86

			Kinerja: Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Sektor Industri pengolahan, Tolok Ukur: Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri pengolahan Rumus Perhitungan: (PDRB sektor industri pengolahan tahun n - PDRB sektor industri pengolahan tahun n-1)/PDRB sektor industri pengolahan tahun n-1 * 100	5,38 Persen	5,39	5,43	5,70	5,70
No	Visi & Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kondisi Awal		Target tahun		Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Kinerja: Meningkatnya pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Tolok Ukur: Laju pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Rumus Perhitungan: (PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tahun n - PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tahun n-1)/PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tahun n-1 * 100	2,02 Persen	2,54	2,66	2,80	2,80
			Kinerja: Meningkatnya Pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, Tolok Ukur: Laju Pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum Rumus Perhitungan: (PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum tahun n - PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum tahun n-1)/PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum tahun n-1 * 100	7,64 Persen	8,46	8,88	9,32	9,32

			Kinerja: Meningkatnya Pembentukan Modal Tetap Bruto (ADHB), Tolok Ukur: Pembentukan Modal Tetap Bruto (ADHB) Rumus Perhitungan: Nilai PMTB	17.130,00 Milyar Rp	17.230,00	17.418,38	18.289,30	18.289,30
No	Visi & Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kondisi Awal		Target tahun		Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1.2		Meningkatnya Penyediaan Layanan Infrastruktur Wilayah	Kinerja: Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Wilayah, Tolok Ukur: Indeks Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Mantap Rumus Perhitungan: (Indeks Ruas Jalan dalam kondisi baik x 30 %)+(Indeks tanam x 20%)+(Indeks Pemenuhan SPM PU x 15 %) + (Indeks Pemenuhan Prasarana Perhubungan x 25%) + (Pemukiman tanpa kumuh x 10%)	88,53 Nilai	88,93	89,23	89,81	89,81
			Kinerja: Meningkatnya status kemajuan dan kemandirian desa, Tolok Ukur: Indeks Desa Membangun (IDM) Rumus Perhitungan: $\frac{IKE + IKS + IKL}{3}$	0,78 Nilai	0,79	0,81	0,83	0,83
1.1.3		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Kinerja: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, Tolok Ukur: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Rumus Perhitungan:	56,96 Nilai	60,80	62,74	64,74	64,74
			Kinerja: Menurunnya Risiko Bencana Daerah, Tolok Ukur: Indeks Risiko Bencana Rumus Perhitungan: Perhitungan dari BNPB	144,56 Persen	142,50	140,25	138,50	138,50

1.1.4		Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat	Kinerja: Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah, Tolok Ukur: Indeks Ketahanan Pangan Rumus Perhitungan: Perhitungan dari Badan Pangan Nasional	82,03 Nilai	82,20	82,60	83,26	83,26
No	Visi & Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kondisi Awal		Target tahun		Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.2		Terwujudnya Pembangunan Manusia yang berkualitas, berdaya saing dan kesetaraan Gender	Kinerja: Meningkatkan derajat pembangunan manusia, Tolok Ukur: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Rumus Perhitungan: Perhitungan BPS	71,81 Poin	72,75	73,65	74,53	74,53
1.2.1		Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Kinerja: Meningkatkan derajat pendidikan daerah, Tolok Ukur: Indeks Pendidikan Rumus Perhitungan: $I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$	59,93 Nilai	60,42	61,26	62,11	62,11
			Kinerja: Meningkatkan budaya literasi masyarakat, Tolok Ukur: Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Rumus Perhitungan: Perhitungan dari Perpustakaan Nasional	2,09 Nilai	4,42	5,42	6,42	6,42
1.2.2		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Kinerja: Meningkatkan Usia Harapan Hidup Masyarakat, Tolok Ukur: Usia Harapan Hidup (UHH) Rumus Perhitungan: Perhitungan dari BPS	74,71 Usia	74,95	75,20	75,45	75,45

			Kinerja: Meningkatnya pembangunan gender daerah, Tolok Ukur: Indeks Ketimpangan Gender Rumus Perhitungan: Perhitungan dari BPS	0,45 Nilai	0,43	0,40	0,38	0,38
1.2.3		Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat	Kinerja: Menurunnya tingkat kemiskinan, Tolok Ukur: Angka Kemiskinan Rumus Perhitungan: Perhitungan BPS	11,20 Persen	10,84	10,50	9,75	9,75
No	Visi & Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kondisi Awal		Target tahun		Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Kinerja: Menurunnya tingkat pengangguran terbuka, Tolok Ukur: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Rumus Perhitungan: Perhitungan BPS	7,65 Persen	7,10	6,65	6,10	6,10
			Kinerja: Meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat, Tolok Ukur: PDRB Perkapita Rumus Perhitungan: Perhitungan BPS	25.970,00 Juta Rupiah	27.493,16	27.493,16	30.892,34	30.892,34
			Kinerja: Menurunnya ketimpangan pendapatan masyarakat, Tolok Ukur: Indeks Gini Rumus Perhitungan: Perhitungan BPS	0,35 nilai	0,34	0,33	0,32	0,32
1.3		Mewujudkan Sistem Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif, Inovatif, dan Kolaboratif	Kinerja: Meningkatnya kinerja sistem tata kelola pemerintahan, Tolok Ukur: Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Rumus Perhitungan: perhitungan berdasarkan permenpanRB	67,83 Poin	68,00	69,00	70,00	70,00

1.3.1		Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan	Kinerja: Meningkatnya kualitas sistem akuntabilitas instansi pemerintahan, Tolok Ukur: Nilai SAKIP Rumus Perhitungan: Nilai AKIP = aspek perencanaan kinerja (30 %) + aspek pengukuran kinerja (30 %) + pelaporan kinerja (15 %) + evaluasi akuntabilitas kinerja internal (25 %)	67,84 Nilai	68,00	68,50	69,00	69,00
No	Visi & Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kondisi Awal		Target tahun		Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Kinerja: Terpenuhinya target opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Tolok Ukur: Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Rumus Perhitungan: Perhitungan dari BPK	4,00 Opini	4,00	4,00	4,00	4,00
			Kinerja: Meningkatnya kualitas sistem pengendalian instansi pemerintahan, Tolok Ukur: Maturitas SPIP Rumus Perhitungan: Perhitungan dari BPKP	3,00 Level	3,00	3,00	3,00	3,00
			Kinerja: Meningkatnya kualitas sistem pemerintahan berbasis elektronik, Tolok Ukur: Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Rumus Perhitungan: Perhitungan Kemenkominfo	3,07 Nilai	3,20	3,25	3,27	3,27
1.3.2		Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Masyarakat	Kinerja: Meningkatnya kualitas kebijakan daerah, Tolok Ukur: Indeks Kualitas Kebijakan Rumus Perhitungan: Perhitungan dari Lembaga Administrasi Negara (LAN)	0,00 Nilai	0,00	50,00	60,00	60,00

			Kinerja: Meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat, Tolok Ukur: Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) Rumus Perhitungan: Hasil Perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat	84,25 Nilai	86,25	87,50	88,75	88,75
No	Visi & Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kondisi Awal		Target tahun		Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Kinerja: Meningkatnya kualitas profesionalisme ASN, Tolok Ukur: Indeks Profesionalisme ASN Rumus Perhitungan: Perhitungan dari aplikasi SIASN Badan Kepegawaian Nasional (BKN)	75,52 Nilai	75,00	76,50	78,00	78,00
			Kinerja: Meningkatnya Inovasi Daerah, Tolok Ukur: Indeks Inovasi Daerah Rumus Perhitungan: Hasil Perhitungan Sistem Inovasi Daerah dari Kemendagri	47,15 Nilai	57,00	58,00	60,00	60,00
			Kinerja: Meningkatnya rasio pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah, Tolok Ukur: Rasio Kemandirian Fiskal Rumus Perhitungan: $\text{Rasio Fiskal Daerah} = \frac{\text{Jumlah Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$	0,19 Nilai	0,20	0,21	0,22	0,22
1.4		Mewujudkan Keamanan, Ketertiban, dan Kondusifitas Daerah	Kinerja: Terwujudnya keamanan, ketertiban dan kondusifitas daerah, Tolok Ukur: Indeks Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Kondusifitas Daerah Rumus Perhitungan: = Rata-Rata Pencapaian Indikator Sasaran Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Kondusifitas Daerah	0,00 Nilai	0,00	60,00	65,00	65,00

1.4.1		Meningkatnya Kondusifitas Daerah	Kinerja: Meningkatnya kondusifitas daerah, Tolok Ukur: Indeks Kondusifitas Wilayah (IKW) Rumus Perhitungan: <small>(Rasio Penyelesaian Konflik Sosial + Rasio Penyelesaian Fraksi / Cesehan Antar Umat Beragama + Rasio Pelanggaran Norma Agama & Sosial dan Adat)</small> $\frac{\dots}{3}$	0,00 Nilai	84,34	84,84	85,34	85,34
No	Visi & Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kondisi Awal		Target tahun		Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.4.2		Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban umum	Kinerja: Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum daerah, Tolok Ukur: Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum Rumus Perhitungan: <small>(% pelanggaran perdas yang ditangani + % pelanggaran K3 yang terselesaikan + % Penanganan Kejadian Kebakaran Sesuai Respon Time)</small> $\frac{\dots}{3} \times 100$	0,00 Nilai	52,00	53,00	54,00	54,00

(Sumber: RPJMD Kabupaten Cirebon 2025-2026)

Berangkat dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai tugas dan pokok fungsinya, Kecamatan Susukan mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah yaitu Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan cerdas serta penguatan otonomi desa dengan indikator capaian sasaran Indeks kepuasan masyarakat (IKM).

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Kecamatan Susukan yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis, dan berkesinambungan.

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Susukan selama 5 tahun anggaran adalah sebagai berikut :

Tujuan dan Sasaran Strategis Kecamatan Susukan
Tahun 2025-2026.

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN				
					2023	2024	2025	2026	
	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintah tingkat Kecamatan	Persen	93.00	95.00	87.50	88.75	
1.1.1.		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat.	Persen	3.95	4.00	5.00	6.00	
1.1.2		Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase Jumlah Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Umum dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	Persen	70.00	75.00	80.00	85.00	
1.1.3.		Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat	Indeks Desa Membangun (IDM).	point	0.80	0.81	70.00	75.00	

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran dengan Menyusun Strategi dan arah kebijakan yang sudah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Susukan Tahun 2019-2025 dapat dilihat dalam table di bawah :

VISI:			
TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN			
MISI : 4			
Meningkatnya Produktifitas Masyarakat untuk lebih Maju dan Unggul sehingga menambah daya saing di Pasar Internasional, Nasional dan Regional, yang didukung oleh Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaran Pemerintah dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Mengoptimalkan Manajemen Pelayanan Publik Kecamatan	Penyederhanaan Mekanisme Pelayanan dan Standar Pelayanan
	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Integrasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan	Peningkatan Akuntabilitas Perencanaan, Penganggaran, Pengawasan dan Pelaporan secara Profesional dan Inovatif
	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatkan Kapasitas Pemerintahan Desa	Mewujudkan Tata Pemerintahan Desa yang baik (good government)

2.3 Struktur Program dan Kegiatan/Subkegiatan Tahun 2025

Struktur Program dan Kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya Sasaran Kecamatan Susukan Tahun 2025 maupun Program dan Kegiatan Pendukung sebagaimana Tabel berikut:

Sasaran strategis	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Sebelum perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.622.617.000,00	2.383.525.750,00	239.091.250,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.375.900,00	4.375.400,00	500
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.820.900,00	2.820.600,00	200
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.555.000,00	1.554.800,00	200
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.227.577.200,00	2.008.117.808,00	219.459.392,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.222.487.200,00	2.003.027.808,00	219.459.392,00

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.783.000,00	2.783.000,00	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.307.000,00	2.307.000,00	-
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	11.400.000,00	11.400.000,00	-
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	11.400.000,00	11.400.000,00	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	49.610.100,00	49.610.100,00	-
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.003.200,00	4.003.200,00	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.793.000,00	25.793.000,00	-
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.004.200,00	3.004.200,00	-
	Penyediaan Bahan/Material	10.085.400,00	10.085.400,00	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45.512.992,00	45.512.992,00	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.152.992,00	40.152.992,00	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.919.300,00	3.919.300,00	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.941.000,00	15.766.822,00	6.174.178,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.541.000,00	10.366.822,00	6.174.178,00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.400.000,00	5.400.000,00	-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	307.712.800,00	294.255.620,00	13.457.180,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	34.712.800,00	34.520.700,00	192.100,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	273.000.000,00	259.734.920,00	13.265.080,00

	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	79.003.600,00	77.348.300,00	1.655.300,00
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	29.271.300,00	29.152.000,00	119.300,00
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	8.208.700,00	8.208.700,00	-
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	21.062.600,00	20.943.300,00	119.300,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	27.938.800,00	26.402.800,00	1.536.000,00
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	27.938.800,00	26.402.800,00	1.536.000,00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.	21.793.500,00	21.793.500,00	-
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	21.793.500,00	21.793.500,00	-
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Ketertiban Umum di Kecamatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	118.553.700,00	118.239.600,00	314.100,00
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100.553.900,00	100.239.800,00	314.100,00
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100.553.900,00	100.239.800,00	314.100,00
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	17.999.800,00	17.999.800,00	-
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	17.999.800,00	17.999.800,00	-

	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	42.338.900,00	42.034.900,00	304.000,00
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	42.338.900,00	42.034.900,00	304.000,00
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik, Indonesia	42.338.900,00	42.034.900,00	304.000,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	39.605.500,00	39.605.500,00	-
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	39.605.500,00	39.605.500,00	-
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun	39.605.500,00	39.605.500,00	-
	JUMLAH	2.902.118.700,00	2.660.754.050,00	241.364.650,00

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi kepada bawahannya untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan Anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Kecamatan Susukan pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA	
				Satuan	Target
		Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintah tingkat Kecamatan	Persen	80,00
1.1.1.		Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Persen	5
1.1.2		Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Koordinasi Ketertiban Umum	Persen	75
1.1.3		Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Status Kemajuan dan Kemandirian Desa	Point	70

Seiring berjalannya penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Susukan melakukan perubahan perjanjian kinerja pada Tahun 2025 dikarnakan Kepala Daerah berakhir masa jabatannya pada bulan mei Tahun 2025, dengan demikian maka terjadi pula perubahan perjanjian kinerja Kepala Perangkat Daerah pada Tuhan 2025 yang dapa dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel : Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA			REALI SASI
				Satuan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
		Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintah tingkat Kecamatan	Persen	80,00	80,00	80,00
1.1.1 .		Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Persen	5	5	5
1.1.2		Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Koordinasi Ketertiban Umum	Persen	75	75	75
1.1.3 .		Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Status Kemajuan dan Kemandirian Desa	Point	70	70	70

Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

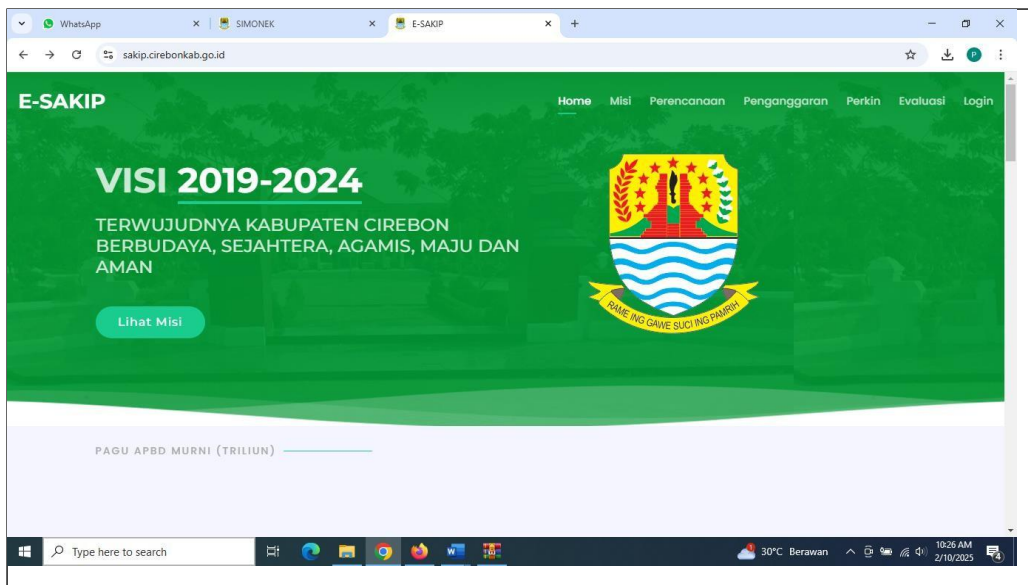
Anggaran belanja Kecamatan Susukan Tahun 2025 yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel : Anggaran Belanja per Sasaran Strategis

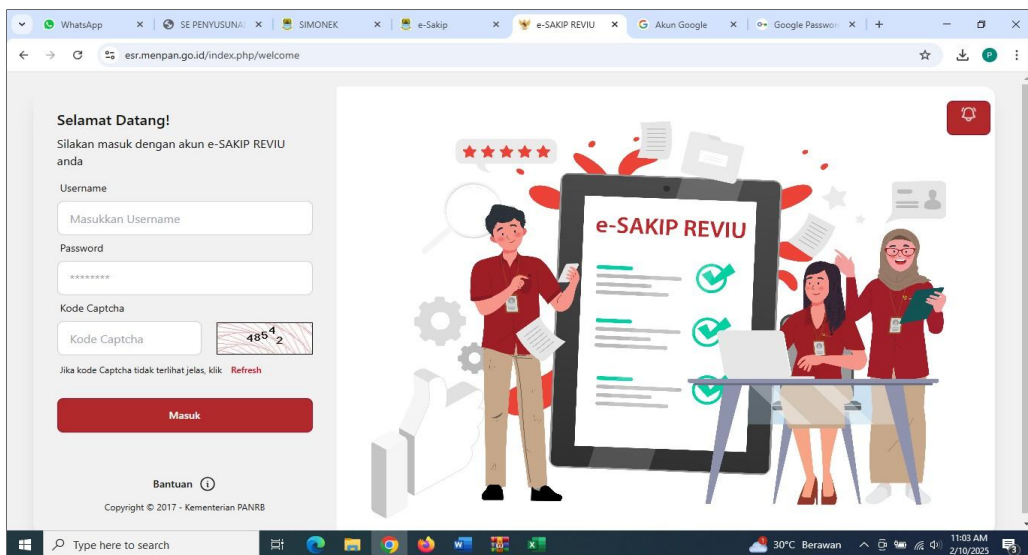
NO	SASARAN STRATEGIS	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	2.,622.617.000.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2.	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Ketertiban Umum di Kecamatan	160.948.000.00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
3.	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat	131.863.600.00	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

2.5 Insrtumen Pendukung

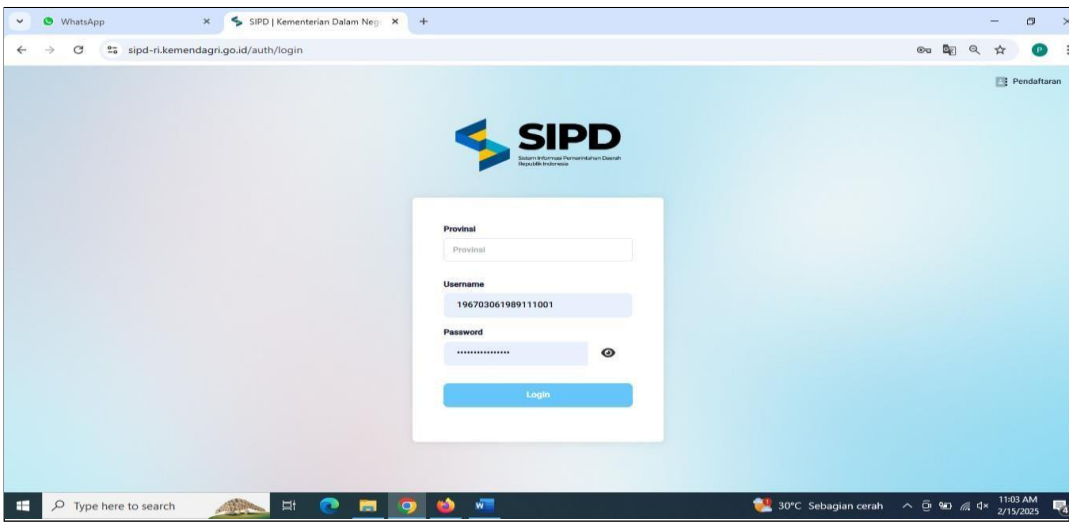
- 1. Instrumen Pendukung Penerapan Sistem akuntablitas Kinerja Pemernitah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon adalah aplikasi E SAKIP cirebonkab.go.id yang didalam nya memuat Data terkait Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja,Evaluasi Internal, dan Pencapaian Kinerja.



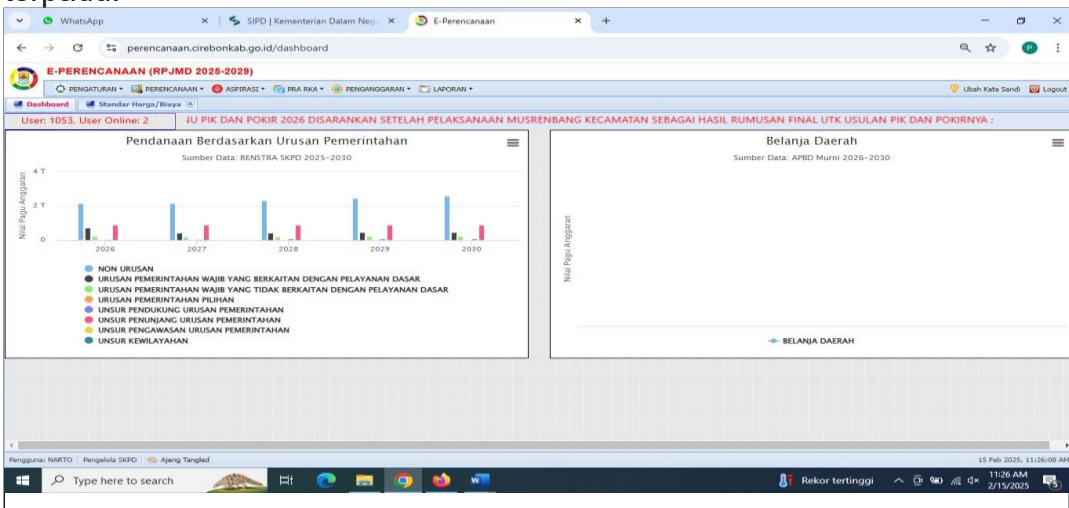
- 2. e-SAKIP REVIU adalah sistem aplikasi yang dibangun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai upaya peningkatan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Sistem ini bertujuan sebagai sarana pembinaan interaktif pelaksanaan Akuntabilitas kerja instansi pemerintah dan sarana penyampaian laporan kinerja secara online.



3. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) digunakan untuk menyusun, mengelola, dan melaporkan data perencanaan, keuangan, dan pembangunan daerah, SIPD RI juga dapat memantau progres penyusunan dokumen perencanaan daerah, Fungsi SIPD RI, Membantu menyusun perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan akuntansi pelaporan daerah dan memantau secara real-time progres penyusunan dokumen perencanaan daerah memastikan data dan informasi pembangunan daerah dapat digunakan secara berbagi pakai oleh instansi terkait, SIPD RI dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang merupakan aplikasi umum Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).



4. Aplikasi e-perencanaan Kabupaten Cirebon berfungsi untuk menyusun rencana kerja dan kebijakan umum. Aplikasi ini juga mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan transparan, Mendukung terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya dan Mendukung terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.



5. Aplikasi SIMONEK (Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Kinerja) Kabupaten Cirebon berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja. Aplikasi ini mendukung kinerja perangkat daerah di Kabupaten Cirebon.

No	Nama SKPD	Jml. Prj	Jml. Keg	Anggaran		
				Pagu	Serapan	Rasio
1	DINAS PENDIDIKAN	12	123	300.743.891.000,00	52.815.836.773,00	18,56 %
2	DINAS KESEHATAN	22	199	388.795.456.688,00	285.854.948.474,00	73,53 %
3	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERKOTAAN DAN PERTANAHAN	15	84	128.283.881.218,00	50.225.128.487,00	39,16 %
4	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERKOTAAN DAN PERTANAHAN	15	83	33.960.087.300,00	28.590.557.650,00	84,19 %
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	10	34	8.809.081.000,00	7.397.879.838,00	83,93 %
6	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERKOTAAN DAN PERTANAHAN	6	29	7.115.017.200,00	6.255.577.819,00	87,92 %
7	DINAS SOSIAL	12	50	6.558.164.800,00	4.875.845.479,00	74,31 %
8	DINAS KETAHANAN PANGAN	5	26	4.083.845.188,00	3.746.365.411,00	91,73 %
9	DINAS LINDUNGAN WISATA	10	39	30.010.894.000,00	20.665.814.556,00	68,86 %
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL	10	43	6.107.888.700,00	4.075.334.250,00	66,73 %
11	DINAS PERBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	9	42	2.486.481.064,00	1.755.930.477,00	71,16 %
12	DINAS PENGENDALIAN PENGUSKON, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	15	55	13.053.472.250,00	12.015.917.755,00	91,84 %
13	DINAS PERHUBUNGAN	11	48	84.222.918.800,00	46.138.164.384,00	54,78 %
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	10	59	10.545.856.200,00	7.016.656.719,00	66,56 %
15	DINAS KOPERASI DAN USAHA KELOMPOK DAN KEMERDEKAAN	10	39	7.851.738.500,00	2.764.074.799,00	35,20 %
16	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERKOTAAN DAN PERTANAHAN	11	38	2.896.732.000,00	2.305.764.518,00	79,60 %
17	DINAS KEBUDAYAAN, PARAWISATA, KEPERLUASAN DAN OLAH RAGA	16	49	7.380.884.200,00	5.380.388.861,00	72,92 %
18	DINAS KEARIFANAN DAN PEPUSTAKAAN	8	40	1.985.000.144,00	1.285.005.904,00	64,71 %

6. Aplikasi E-Kinerja BKN berfungsi untuk memantau, mengawasi, dan mengevaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Aplikasi ini juga membantu dalam pengambilan keputusan manajemen, Manfaat Aplikasi E-Kinerja BKN adalah untuk memudahkan pengelolaan kinerja ASN, mulai dari penyusunan SKP hingga penilaian SK serta menjadi dasar pembayaran Tunjangan Kinerja/Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP),

silahkan login dengan user MyASN

Login

BAB 3
AKUNTABILITAS KINERJA

Bab 3 Berisi :

- 1. Capaian Kinerja Tahun 2025
- 2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2025

Capaian kinerja tahun 2025 diperoleh dari evaluasi dan pengukuran data kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang disepakati, serta mengacu pada perjanjian kinerja Kecamatan Susukan. dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2.	$75 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Susukan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Susukan beserta target dan capaian realisasinya rincian sebagai berikut:

Tabel Capaian Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2		3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan		Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat.	Persen	79	79	100%
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Prosentase Kepatuhan dalam Pelaksanaan SOP Pelayanan Pemerintah	Persen	100	100	100%
2.	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Ketertiban Umum di Kecamatan		Persentasi Jumlah Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Umum dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan.	Persen	75.00	75.00	100%
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase PeningkatanEfektivitas Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Persen	100	100	100%
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Prosentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan yang dilakukan	Persen	100	100	100%
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilakukan	Persen	100	100	100%
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Prosentase jumlah urusan pemerintahan umum yang di tugaskan kepala pemerintah daerah kepada camat	Persen	0	0	0
3.	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat		Indeks Desa Membangun (IDM).	Ponit	0.72	0.81	111,81%
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Peningkatan Prosentase kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa	Persen	0	0	0

Dari tabel di atas, terdapat 3 (tiga) sasaran strategis yang terbagi ke dalam 3 (tiga) indikator kinerja sasaran. Pada Tahun 2025, terdapat 2 (dua) indikator telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar (100,00%), Sementara itu, terdapat 1 (satu) indikator yang melebihi target. Keberhasilan melebihi target dalam Indikator Indeks Desa membangun tidak terlepas dari bimbingan dan Fasilitasi peran Kecamatan Susukan dalam membina Desa, dimana pada Tahun 2025 ada 4 Desa di Wilayah Kecamatan Susukan yang berstatus Desa Mandiri, diantaranya Desa Susukankulon, Desa Bojongnegara, Desa Jatiseeng dan Desa Susukantengah.

Selain itu terdapat terdapat 6 (Enam) sasaran Program dimana 4 (empat) program mempunyai target Kinerja dan anggaran dan 2 (dua) program tidak mempunyai target kinerja dan anggaran, 4 (empat) program yang mempunyai target kinerja dan anggaran mempunyai tingkat capaian kinerja \pm 100 % dengan katagori sangat baik. Adapun Capaian Kinerja yang membandingkan antara target kinerja tahun ini dengan tahun yang lalu dapat di lihat dalam table di bawah ini:

Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra

No	Tujuan/Sasaran, Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target dan Realisasi Tahun 2023			Target dan Realisasi Tahun 2024			Target dan Realisasi Akhir Renstra Tahun 2025			Perbandingan Realisasi Renstra dengan RPJMD	
			Target	Realisasi	Capain	Target	Realisasi	Capain	Target	Realisasi	Capain	Target	Realisasi
1.1	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintah tingkat Kecamatan	78.00 %	78.00 %	100%	79 %	79 %	100 %	79 %	79 %	100 %		
1.1.1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat.	81%	81.50%	100%	82 %	82 %	100 %	82 %	82 %	100 %		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Prosentase Kepatuhan dalam Pelaksanaan SOP Pelayanan Pemerintah	100 %	99.52 %	99.52 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		
1.1.2	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentasi Jumlah Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Umum dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan.	70.00 %	70 %	100 %	75 %	75 %	100 %	75 %	75 %	100 %		
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Prosentase Peningkatan Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	Prosentase Peningkatan Pemberdayaan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		

	Dan Kelurahan	Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilakukan											
	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilakukan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Prosentase jumlah urusan pemerintahan umum yang di tugaskan kepala pemerintah daerah kepada camat	100 %	0 %	0%	100 %	0 %	0%	100 %	0 %	0%		
1.1.3	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat	Indeks Desa Membangun (IDM).	0,70	0,80	114 %	0,72 Point	0,81 Point	111 %	0,72 Point	0,81 Point	111 %		
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Peningkatan Prosentase kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa	100 %	0 %	0%	100 %	0 %	0%	100 %	0 %	0%		



**RUMUSAN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN
INDIKATOR RPD PERIODE 2025-2026
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

No	Visi & Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kondisi Awal		Target tahun		Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	VISI: -							
1	-							
1.1		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Produktivitas Daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan	Kinerja: Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi, Tolok Ukur: Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Rumus Perhitungan: Perhitungan BPS	4,85 Persen	5,08	5,30	5,70	5,70
1.1.1		Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Sektor Unggulan	Kinerja: Meningkatnya pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Tolok Ukur: Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Rumus Perhitungan: (PDRB sektorSektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tahun n - PDRB sektor Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tahun n-1)/PDRB sektor Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tahun n-1 * 100	-2,13 Persen	4,41	4,63	4,86	4,86
			Kinerja: Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Sektor Industri pengolahan, Tolok Ukur: Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri pengolahan Rumus Perhitungan: (PDRB sektor industri pengolahan tahun n - PDRB sektor industri pengolahan tahun n-1)/PDRB sektor industri pengolahan tahun n-1 * 100	5,38 Persen	5,39	5,43	5,70	5,70

No	Visi & Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kondisi Awal		Target tahun		Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Kinerja: Meningkatnya pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Tolok Ukur: Laju pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Rumus Perhitungan: (PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tahun n - PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tahun n-1)/PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tahun n-1 * 100	2,02 Persen	2,54	2,66	2,80	2,80
			Kinerja: Meningkatnya Pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, Tolok Ukur: Laju Pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum Rumus Perhitungan: (PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum tahun n - PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum tahun n-1)/PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum tahun n-1 * 100	7,64 Persen	8,46	8,88	9,32	9,32
			Kinerja: Meningkatnya Pembentukan Modal Tetap Bruto (ADHB), Tolok Ukur: Pembentukan Modal Tetap Bruto (ADHB) Rumus Perhitungan: Nilai PMTB	17.130,00 Milyar Rp	17.230,00	17.418,38	18.289,30	18.289,30

No	Visi & Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kondisi Awal		Target tahun		Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1.2		Meningkatnya Penyediaan Layanan Infrastruktur Wilayah	Kinerja: Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Wilayah, Tolok Ukur: Indeks Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Mantap Rumus Perhitungan: (Indeks Ruas Jalan dalam kondisi baik x 30 %)+(Indeks tanam x 20%)+(Indeks Pemenuhan SPM PU x 15 %) + (Indeks Pemenuhan Prasarana Perhubungan x 25%) + (Pemukiman tanpa kumuh x 10%)	88,53 Nilai	88,93	89,23	89,81	89,81
			Kinerja: Meningkatnya status kemajuan dan kemandirian desa, Tolok Ukur: Indeks Desa Membangun (IDM) Rumus Perhitungan: $\frac{IKE + IKS + IKL}{3}$	0,78 Nilai	0,79	0,81	0,83	0,83
1.1.3		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Kinerja: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, Tolok Ukur: Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Rumus Perhitungan:	56,96 Nilai	60,80	62,74	64,74	64,74
			Kinerja: Menurunnya Risiko Bencana Daerah, Tolok Ukur: Indeks Risiko Bencana Rumus Perhitungan: Perhitungan dari BNPB	144,56 Persen	142,50	140,25	138,50	138,50
1.1.4		Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat	Kinerja: Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah, Tolok Ukur: Indeks Ketahanan Pangan Rumus Perhitungan: Perhitungan dari Badan Pangan Nasional	82,03 Nilai	82,20	82,60	83,26	83,26

No	Visi & Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kondisi Awal		Target tahun		Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.2		Terwujudnya Pembangunan Manusia yang berkualitas, berdaya saing dan kesetaraan Gender	Kinerja: Meningkatnya derajat pembangunan manusia, Tolok Ukur: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Rumus Perhitungan: Perhitungan BPS	71,81 Poin	72,75	73,65	74,53	74,53
1.2.1		Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Kinerja: Meningkatnya derajat pendidikan daerah, Tolok Ukur: Indeks Pendidikan Rumus Perhitungan: $I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$	59,93 Nilai	60,42	61,26	62,11	62,11
			Kinerja: Meningkatnya budaya literasi masyarakat, Tolok Ukur: Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Rumus Perhitungan: Perhitungan dari Perpustakaan Nasional	2,09 Nilai	4,42	5,42	6,42	6,42
1.2.2		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Kinerja: Meningkatnya Usia Harapan Hidup Masyarakat, Tolok Ukur: Usia Harapan Hidup (UHH) Rumus Perhitungan: Perhitungan dari BPS	74,71 Usia	74,95	75,20	75,45	75,45
			Kinerja: Meningkatnya pembangunan gender daerah, Tolok Ukur: Indeks Ketimpangan Gender Rumus Perhitungan: Perhitungan dari BPS	0,45 Nilai	0,43	0,40	0,38	0,38
1.2.3		Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat	Kinerja: Menurunnya tingkat kemiskinan, Tolok Ukur: Angka Kemiskinan Rumus Perhitungan: Perhitungan BPS	11,20 Persen	10,84	10,50	9,75	9,75

No	Visi & Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kondisi Awal		Target tahun		Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Kinerja: Menurunnya tingkat pengangguran terbuka, Tolok Ukur: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Rumus Perhitungan: Perhitungan BPS	7,65 Persen	7,10	6,65	6,10	6,10
			Kinerja: Meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat, Tolok Ukur: PDRB Perkapita Rumus Perhitungan: Perhitungan BPS	25.970,00 Juta Rupiah	27.493,16	27.493,16	30.892,34	30.892,34
			Kinerja: Menurunnya ketimpangan pendapatan masyarakat, Tolok Ukur: Indeks Gini Rumus Perhitungan: Perhitungan BPS	0,35 nilai	0,34	0,33	0,32	0,32
1.3		Mewujudkan Sistem Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif, Inovatif, dan Kolaboratif	Kinerja: Meningkatnya kinerja sistem tata kelola pemerintahan, Tolok Ukur: Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Rumus Perhitungan: perhitungan berdasarkan permenpanRB	67,83 Poin	68,00	69,00	70,00	70,00
1.3.1		Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan	Kinerja: Meningkatnya kualitas sistem akuntabilitas instansi pemerintahan, Tolok Ukur: Nilai SAKIP Rumus Perhitungan: Nilai AKIP = aspek perencanaan kinerja (30 %) + aspek pengukuran kinerja (30 %) + pelaporan kinerja (15 %) + evaluasi akuntabilitas kinerja internal (25 %)	67,84 Nilai	68,00	68,50	69,00	69,00

No	Visi & Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kondisi Awal		Target tahun		Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Kinerja: Terpenuhinya target opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Tolok Ukur: Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Rumus Perhitungan: Perhitungan dari BPK	4,00 Opini	4,00	4,00	4,00	4,00
			Kinerja: Meningkatnya kualitas sistem pengendalian instansi pemerintahan, Tolok Ukur: Maturitas SPIP Rumus Perhitungan: Perhitungan dari BPKP	3,00 Level	3,00	3,00	3,00	3,00
			Kinerja: Meningkatnya kualitas sistem pemerintahan berbasis elektronik, Tolok Ukur: Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Rumus Perhitungan: Perhitungan Kemenkominfo	3,07 Nilai	3,20	3,25	3,27	3,27
1.3.2		Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Masyarakat	Kinerja: Meningkatnya kualitas kebijakan daerah, Tolok Ukur: Indeks Kualitas Kebijakan Rumus Perhitungan: Perhitungan dari Lembaga Administrasi Negara (LAN)	0,00 Nilai	0,00	50,00	60,00	60,00
			Kinerja: Meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat, Tolok Ukur: Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) Rumus Perhitungan: Hasil Perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat	84,25 Nilai	86,25	87,50	88,75	88,75

No	Visi & Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kondisi Awal		Target tahun		Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Kinerja: Meningkatnya kualitas profesionalisme ASN, Tolok Ukur: Indeks Profesionalisme ASN Rumus Perhitungan: Perhitungan dari aplikasi SIASN Badan Kepegawaian Nasional (BKN)	75,52 Nilai	75,00	76,50	78,00	78,00
			Kinerja: Meningkatnya Inovasi Daerah, Tolok Ukur: Indeks Inovasi Daerah Rumus Perhitungan: Hasil Perhitungan Sistem Inovasi Daerah dari Kemendagri	47,15 Nilai	57,00	58,00	60,00	60,00
			Kinerja: Meningkatnya rasio pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah, Tolok Ukur: Rasio Kemandirian Fiskal Rumus Perhitungan: $\text{Rasio Fiskal Daerah} = \frac{\text{Jumlah Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$	0,19 Nilai	0,20	0,21	0,22	0,22
1.4		Mewujudkan Keamanan, Ketertiban, dan Kondusifitas Daerah	Kinerja: Terwujudnya keamanan, ketertiban dan kondusifitas daerah, Tolok Ukur: Indeks Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Kondusifitas Daerah Rumus Perhitungan: = Rata-Rata Pencapaian Indikator Sasaran Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Kondusifitas Daerah	0,00 Nilai	0,00	60,00	65,00	65,00
1.4.1		Meningkatnya Kondusifitas Daerah	Kinerja: Meningkatnya kondusifitas daerah, Tolok Ukur: Indeks Kondusifitas Wilayah (IKW) Rumus Perhitungan: <small>(Rasio Penyelesaian Konflik Sosial + Rasio Penyelesaian Fraksi/ Cesekan Antar Umat Beragama + Rasio Pelanggaran Norma Agama, Sosial dan Adat)</small> 3	0,00 Nilai	84,34	84,84	85,34	85,34

No	Visi & Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kondisi Awal		Target tahun		Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.4.2		Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban umum	Kinerja: Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum daerah, Tolok Ukur: Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum Rumus Perhitungan: <small>(% pelanggaran perdas yang ditangani + % pelanggaran K3 yang terselesaikan + % Penanganan Kejadian Kabakaran Sesuai Respon Time) 3 x 100</small>	0,00 Nilai	52,00	53,00	54,00	54,00

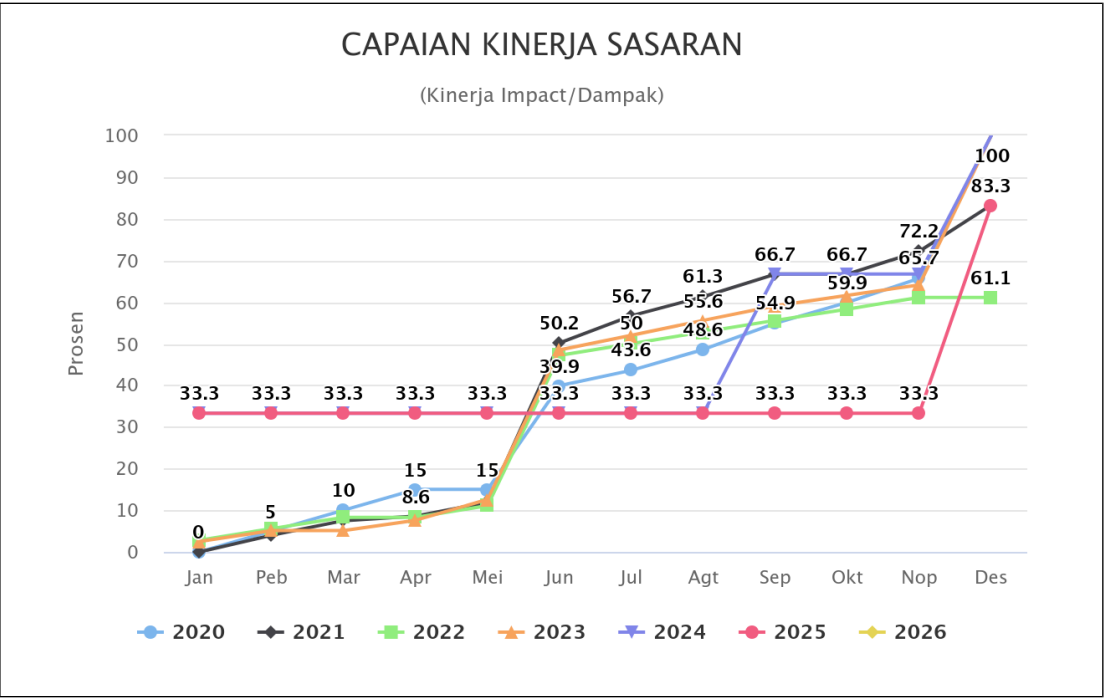
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Kecamatan Susukan yang direpresentasikan ke dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci untuk setiap indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA SASARAN 1

3.2.1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran Meningkatnya Kulaitas Pelayanan Publik menggunakan Parameter wajib yang digunakan untuk mengukur tingkat Kepuasan masyarakat dalam pelayanan yaitu Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat dengan menggunakan Survai Kepuasan Masyarakat (IKM) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Dengan cara ini, masyarakat diberikan kesempatan mengevaluasi kualitas pelayanan yang diselenggarakan suatu unit kerja.Salah satu faktor utama dalam mewujudkan pemerintahan bersih (clean goverment) dan kepemerintahan yang baik (good governance) adalah : partisipasi, transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum dan kesetaraan menjadi hal penting dalam penciptaan iklim birokrasi yang sehat. dalam konteks pembangunan sistem administrasi Negara. Reformasi birokrasi sangat menentukan efisiensi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.di bawah ini adalah Grafik Capain Kinerja Sasaran Kinerja Kecamatan Susukan dari Tahun 2020 - 2026. dimana salah satu indikator sasaran kinerja yaitu Meningkatkan Indeks Kepauasan Masyarakat.



Tolok ukur capaian sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik diukur dengan 1 (satu) indikator yaitu Indeks Kepuasan masyarakat. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut :

Tabel : Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran Sasaran Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat

NO	Sasaran	Indikator	Formula Indikator
1	2	3	4
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat.	Hasil survai Indeks Kepuasan Masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku

Kinerja sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator	Formula	Realisasi 2025	2025		% Capaian
			Target	Realisasi	
Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat.	Hasil survai Indeks Kepuasan Masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku	81,50%	82 %	82 %	100%

Dari table diatas diperoleh angka kenaikan sasaran setrategis dari Tahun 2025 dengan angka capaian kinerja 81.50% dan meningkat pada Tahun 2025 dengan angka capaian 82% yang sesuai dengan target kinerja pada Renstra KecamatanSusukan Tahun 2025-2026.

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

Indikator Kinerja Program Meningkatnya Prosentase Kepatuhan dalam Pelaksanaan SOP Pelayanan Pemerintah Rumus indikator kinerja Program Meningkatnya Prosentase Kepatuhan dalam Pelaksanaan SOP Pelayanan Pemerintah dengan menggunakan rumus :

Jumlah Pelayanan yang disediakan

Rumus = x 100 %

Jumlah Pelayanan yang dibutuhkan

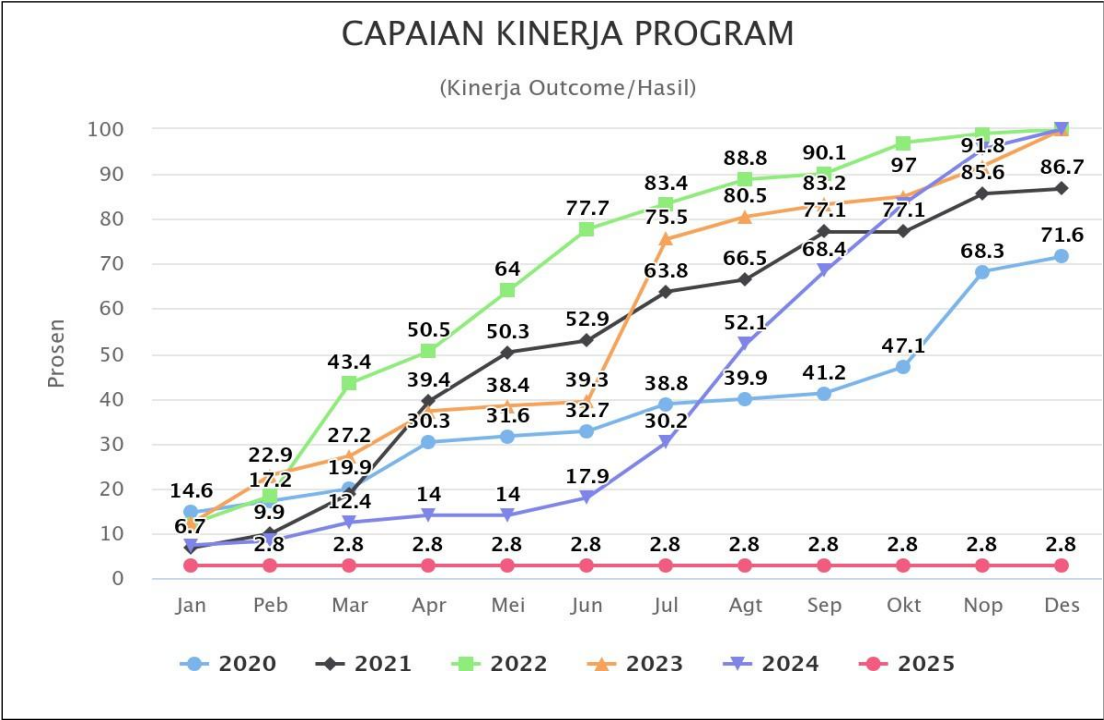
Berdasarkan rumus yang digunakan pada indikator 1 ini, didapatkan hasil realisasi sebesar:

15 Layanan

Realisasi =

15 layanan

x 100 %



Dukungan untuk tercapainya kinerja Sasaran 1 diperoleh dari indikator kinerja program Meningkatnya Prosentase Kepatuhan dalam Pelaksanaan SOP Pelayanan Pemerintah . Tingkat keberhasilan pada indikator program ini dapat dikatakan berhasil dengan capaian sebesar 100 % . .

Faktor Pendorong:

1. Adanya Survai IKM dengan menggunakan Geogel Form dengan alamat link : <https://forms.gle/oFYLnVErj6wVQogG9>
2. Adanya Sumberdaya Apartur yang bisa mengarahkan Pemohon Pelayanan untuk mengisi IKM.
3. Ruang Pelayanan Umum yang lebih Respentatif.
4. Tersedianya Blanko KTP dan KK

Faktor Penghambat:

1. Kurangnya sarana dan pra sarana pelayanan seperti (Komputer, Printer, Kursi tunggu pemohon, CCTV dan lain lain)
2. Terbatasnya jumlah petugas pelayanan umum

Solusi:

- 1. Menganggarkan belanja untuk sarana dan prasarana palayana umum
- 2. Mengusulkan tambahan petugas pelayanan umum yang berstaus ASN ke BKPSD kabupaten Cirebon

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian Keberhasilan indikator Kinerja pada sasaran 1 (satu) di dukung oleh 1 (satu) program yaitu Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan 5 (lima) kegiatan, dimana kegiatan tersebut sangat mendukung terhadap pencapaian kinerja baik program ataupun sasaran, berikut merupakan tabel analisa efesiensi penggunaan sumber daya :

Indikator Kinerja Sasaran	Program/ Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Efisiensi
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
Meningkatka n Indeks Kepuasan Masyarakat.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	100	100	2.622.617.000,00	2.383.525.750,00	90,88	5,44 %
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100	100	100	79.003.600,00	77.348.300,00	97,90	4,21 %
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100	100	100	118.553.700,00	118.239.600,00	99,74	2,10 %
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	100	100	100	42.338.900,00	42.034.900,00	99,28	1,32 %
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	100	100	39.605.500,00	39.605.500,00	100	-

3.2.2. Sasaran Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Ketertiban Umum di Kecamatan

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperhatikan letak dan kondisi geografis daerah perlu memaksimalkan peran kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan dalam melaksanakan pelayanan publik Kecamatan mempunyai peran strategis dalam pembinaan dan pengawasan Desa. tugas itu meliputi fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dituangkan dalam Pasal 154 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, mempunyai peran :

1. Mengevaluasi Peraturan Desa : Rancangan Peraturan APB Desa, Pungutan Desa, Tata Ruang, dan organisasi Pemerintah Desa. Camat mempunyai waktu 20 hari terhitung sejak diterimanya Perdes untuk dievaluasi.
2. Klarifikasi terhadap Peraturan Desa, Perdes yang telah diundangkan disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk diklarifikasi dengan membentuk Tim Klarifikasi paling lambat 30 hari sejak diterimanya Perdes.
3. Menjaga Kondusifitas wilayah di Kecamatan
4. Menjaga Ketentraman dan Ketertiban di wilayah kecamatan.

Camat juga melakukan koordinasi pendampingan dalam penyusunan perencanaan desa. Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh komponen atau elemen masyarakat dengan semangat kebersamaan dan kegotongroyongan mengelola sumber daya desa untuk tujuan kesejahteraan bersama. Tim penyusun RPJMDes melakukan penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten supaya sinergis. Penyelarasan dilakukan dengan jalan mengikuti sosialisasi dan atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan sekurangnya : RPMJD Kabupaten, rencana strategis OPD, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, Rincian Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan rencana pembangunan kawasan.

Tolok ukur capaian sasaran Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Ketertiban Umum di Kecamatan Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Ketertiban Umum di Kecamatan

NO	Sasaran	Indikator	Formula Indikator
1	2	3	4
	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentasi Jumlah Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Umum dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan.	Jumlah Kewenangan yang dilimpahkan / jumlah keweangan yang dilaksanakan x 100 persen.

$$\text{Realisasi} = \frac{7 \text{ Kewenangan yang dipilihkan}}{7 \text{ Kewenangan yang dilaksanakan}} \times 100\%$$

Penjelasan Komponen Kewenangan yang masuk dalam Rumus Perhitungan tersebut sesuai dengan Bupati Cirebon Nomor 67 Tahun 2014 adalah :

1. Bidang Kesehatan
2. Bidang Pendidikan
3. Bidang Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Energi Sumber Daya Mineral
4. Bidang Penataan Ruangan dan Perencanaan Pembangunan
5. Bidang Perhubungan
6. Bidang Lingkungan Hidup
7. Bidang Pertahanan.

Kinerja sasaran Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Ketertiban Umum di Kecamatan pada Tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator	Formula	Realisasi 2025	2025		% Capaian
			Target	Realisasi	
Persentasi Jumlah Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Umum dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	Jumlah Kewenangan yang dilimpahkan / jumlah keweangan yang dilaksanakan x 100 persen.	80.00%	80.00%	80.00%	100%

Capaian indikator kinerja Persentasi Jumlah Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Umum dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan pada Tahun 2025 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan Tahun 2025, hal ini sesuai dengan target pada Renstra kecamatan Susukan Tahun 2025-2026, keniakan capaian kinerja tersebut didukung dengan capain kinerja program yang rata rata capaiannya 100 % pada Tahun 2025, berikut adalah data capaian kinerja program.

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

Indikator Kinerja Program dalam mendukung sasaran Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Ketertiban Umum di Kecamatan terdiri dari 4(empat) program yang sudah ditetapkan dalama dokumen rencana strategis kecamatan Susukan tahun 2019-2025, progam tersebut diantaranya :

NO	Program	Indikator	Formula Indikator
1	2	3	4
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayana Publik	Prosentase PeningkatanEfektifitas Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	$\frac{\text{Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilakukan}}{\text{Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Direncanakan}} \times 100\%$
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Prosentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan yang dilakukan	$\frac{\text{jumlah pemberdayaan desa (desa mandiri)}}{\text{jumlah total desa sekecamatan}} \times 100\%$

3	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilakukan	$\frac{\text{Jumlah kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang di laksanakan}}{\text{Jumlah kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang di rencanakan}} \times 100\%$
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Prosentase jumlah urusan pemerintahan umum yang di tugaskan kepala pemerintah daerah kepada camat	$\frac{\text{Jumlah urusan pemerintahan umum yang ditugaskan}}{\text{Jumlah urusan pemerintahan umum seluruhnya}} \times 100\%$

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian Keberhasilan indikator Kinerja pada sasaran 2 (dua) didukung oleh 4 (empat) program yaitu dan 6 (enam) kegiatan, dimana kegiatan tersebut sangat mendukung terhadap pencapaian kinerja baik program ataupun sasaran, berikut merupakan tabel analisa efesiensi penggunaan sumber daya:

Indikator Kinerja Sasaran	Program/ Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Efisiensi
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100	100	100	2.622.617.000,00	2.383.525.750,00	90,88	1,19
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	100	4.375.900,00	4.375.400,00	99,99	0,16
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100	2.227.577.200,00	2.008.117.808,00	90,15	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100	11.400.000,00	11.400.000,00	100	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			100	49.610.100,00	49.610.100,00	100	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100	21.941.000,00	15.766.822,00	71,86	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100	307.712.800,00	294.255.620,00	95,63	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			100	79.003.600,00	77.348.300,00	97,90	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan			100	29.271.300,00	29.152.000,00	99,59	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			100	27.938.800,00	26.402.800,00	94,50	

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			100	21.793.500,00	21.793.500,00	100	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			100	118.553.700,00	118.239.600,00	99,74	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			100	100.553.900,00	100.239.800,00	99,69	
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			100	17.999.800,00	17.999.800,00	100	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			100	42.338.900,00	42.034.900,00	99,28	
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			100	42.338.900,00	42.034.900,00	99,28	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			100	39.605.500,00	39.605.500,00	100	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			100	39.605.500,00	39.605.500,00	100	

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi serapan anggaran sampai dengan Bulan Desember Tahun 2025, Kecamatan Susukan mengelola anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Cirebon Sejumlah Rp.2.902.118.700,00 dengan realisasi sejumlah Rp.2.660.754.050,00 atau tercapai 91,68%, sedangkan sisa anggaran yang tidak diserap sejumlah Rp.94.870.379,00 sehingga dapat dikatakan pengguna anggaran dalam pencapaian kinerja telah efisien. Terdapat efisiensi atau sisa anggaran sejumlah Rp.241.364.650,00 atau 3,59% yang bersumber dari :

1. Sisa Belanja Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Sisa Belanja ATK, Kertas dan Cover
3. Sisa Belanja penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
4. Sisa Belanja Makanan dan minuman rapat, Honorarium Narasumber
5. Sisa Belanja kecelakaan Kerja (JKK) dan Belanja Jaminan Kematian

Ada beberapa Faktor Dalam rangka menunjang indikator sasaran Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Ketertiban Umum di Kecamatan Susukan pada Tahun 2025 diantaranya:

Faktor Pendorong:

1. Adanya Undang–Undang yang mengatur secara khusus tentang Pemerintahan Desa yaitu Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
2. Adanya Peraturan yang mengatur tentang Alokasi Dana Desa sebagai sumber dana yang di Kelola oleh Pemerintah Desa
3. Adanya Aset Desa yang bisa dikelola sebagai Pendapatan Asli Desa

Faktor Penghambat:

1. Terbatasnya Kualitas SDM Apartur Desa
2. Apartur di desa banyak yang belum memahami Peraturan tentang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
3. Tidak tertibnya Pencatatan Administrasi Aset Desa.

Tindak Lanjut:

1. Rekrutmen Aparatur Pemerintahan Desa harus di utamakan bagi perngakat desa yang mempunyai pengetahuan dan mempuyai keahlian dalam administrasi perkantoran.
2. Mengadakan Sosialisasi tentang Pertuaran Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

INDIKATOR KINERJA SASARAN 3

3.2.3. Sasaran Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat

Desa mempunyai peran yang cukup besar dalam upaya menentukan arah visi membentuk sumber daya manusia yang lebih baik di masa depan. Upaya tersebut dapat dimulai dengan menggerakkan pembangunan, meningkatkan kualitas hidup, serta kesejahteraan masyarakat desa. Aspek yang penting untuk mencapai visi tersebut adalah pembangunan desa. Dalam hal pembangunan desa, instrumen yang perlu diketahui adalah bagaimana permasalahan yang sebenarnya dialami oleh desa dan seberapa besar dan kuat potensi desa yang dimiliki.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui Permendesa No. 2 Tahun 2016, telah menetapkan beberapa indikator yang memberi kemudahan kepada desa untuk mengetahui sejauh mana tingkat kemandirian desanya. Dengan adanya instrumen tersebut, desa dapat mengenali dan menggali informasi, sejauh mana permasalahan yang dialami dan potensi yang dimiliki untuk mendorong desa keluar dari jerat masalahnya.

Indeks Desa Membangun (IDM) adalah indeks komposit yang dibentuk dari 3 jenis indeks, yakni :

- 1. Indeks Ketahanan Sosial,
- 2. Indeks Ketahanan Ekonomi dan
- 3. Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan

Tolok ukur capaian sasaran Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat diukur dengan 1 (satu) indikator yaitu Indeks desa Membangun, Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat

NO	Sasaran	Indikator	Formula Indikator
1	2	3	4
1	Meningkatnya Status Kemajuan dan Kemandirian Desa	Nilai Indeks Desa Membangun (IDM) Kecamatan	Capaian Komponen Indeks Desa Membangun setiap Desa

Kecamatan Susukan dalam hal ini sangat berperan penting dalam menentukan status desa, pada Tahun 2025 Kecamatan Susukan ada 4 (empat) Desa yang berstatus mandiri, dan 5 (lima) Desa yang berstatus maju dan 1(satu) Desa dengan status Desa berkembang.

Kinerja sasaran Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat pada Tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator	Formula	Realisasi 2025	2025		% Capaian
			Target	Realisasi	
Indeks Desa Membangun (IDM).	Capaian Komponen Indeks Desa Membangun setiap Desa	70.00 Poin	70.00	70.00	100 %

IDM Kecamatan Susukan pada tahun ke tahun mengalami kenaikan, data tersebut di dapatkan dari pendamping desa yang bertugas di desa se wilayah kecamatan Susukan dimana pada Tahun 2025 target 0.72 poin tercapai 70,00 poin dengan angka capaian 100% dan masuk dalam kategori di tingkat kecamatan dengan katagori maju.

Kategor Desa bisa masuk kategori mandiri memiliki nilai IDM >0,8155. Desa maju memiliki nilai IDM ≤0,8155 dan >0,7072. Lalu, desa berada di kategori berkembang jika memiliki skor IDM ≤0,7072 dan >0,5989. Desa yang memiliki IDM ≤0,5989 dan >0,4907 termasuk dalam kategori tertinggal.

Berikut ini ada Data Indeks Desa Membangun Kecamatan Susukan pada Tahun 2025

JAWA BARAT	CIREBON	SUSUKAN	3209272001	TANGKIL	68,35	BERKEMBANG	79,04	MAJU		
JAWA BARAT	CIREBON	SUSUKAN	3209272002	WIYONG	86,30	MANDIRI				
JAWA BARAT	CIREBON	SUSUKAN	3209272003	KEDONGDONG	71,97	MAJU				
JAWA BARAT	CIREBON	SUSUKAN	3209272004	GINTUNG LOR	74,17	MAJU				
JAWA BARAT	CIREBON	SUSUKAN	3209272005	BOJONG KULON	84,57	MANDIRI				
JAWA BARAT	CIREBON	SUSUKAN	3209272006	KEJIWAN	76,38	MAJU				
JAWA BARAT	CIREBON	SUSUKAN	3209272007	SUSUKAN	88,19	MANDIRI				
JAWA BARAT	CIREBON	SUSUKAN	3209272008	LUWUNG KENCANA	72,60	MAJU				
JAWA BARAT	CIREBON	SUSUKAN	3209272009	BUNDER	83,31	MANDIRI				
JAWA BARAT	CIREBON	SUSUKAN	3209272010	JATIPURA	81,42	MANDIRI				
JAWA BARAT	CIREBON	SUSUKAN	3209272011	UJUNGGEBAK	73,39	MAJU				
JAWA BARAT	CIREBON	SUSUKAN	3209272012	JATIANOM	87,87	MANDIRI				

Pada Tahun 2025 indikator Kinerja sasaran Indeks Desa Membangun (IDM) tidak didukung oleh anggran dan tidak mempunyai target kinerja, hal ini tidak berpengaruh terhadap pencapaian sasaran yang telah di tetapkan, dengan komitmen dari pegawai kecamatan Susukan sehingga target kinerja tersebut bisa tercapai secara keseluruhan desa yang ada diwilayah kecamatan Susukan IDM Kecapatan Susukan memperoleh nilai 0,8051 dengan kategori maju. hal ini tidak terlepas dari beberapa faktor.

Ada beberapa Faktor dalam rangka menunjang indikator sasaran Indeks Desa Membangun di Kecamatan Susukan pada Tahun 2025 dianataranya:

Faktor Pendorong:

1. Kecamatan Susukan di tetapkan sebagai pusta kegiatan lokal dari pemerintah kabupaten Cirebon
2. Adanya Petugas pendamping Desa di setiap desa untuk menilai status Desa
3. Koordinasi yang yang baik antara Pemerintahan Desa dengan Kecamatan

Faktor Penghambat:

1. Terbatasnya Kualitas SDM Apartur Desa
2. Rendahnya pemahaman aparatur Desa tentang Desa membangun
3. Kurangnya dukungan masyarakat tentang pemberdayaan di desa

Tindaklanjut :

1. Mengadakan Bimbingan Teknis tentan Desa Membangun
2. Peningkatkan Pemberdayaan Masyarakat melalui Kegiatan Musrenbang ditingkat kecamatan
3. Mendorong Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pembangunan Infarstuktur di desa.

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

Indikator Kinerja Program dalam mendukung sasaran Indeks Desa Membangun terdiri dari 1 (satu) program yang sudah ditetapkan dalama dokumen rencana strategis kecamatan Susukan tahun 2019-2025, progam tersebut adalah:

NO	Program	Indikator	Formula Indikator
1	2	3	4
1	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Peningkatan Prosentase kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa	$\frac{\text{Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan}}{\text{Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan yang direncanakan}} \times 100$

Pada Tahun 2025 Indikator kinerja peningkatan persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa tidak didukung oleh anggaran, hal ini semata mata karna selahan dari perencanaan pada Tahun 2025.

ndikator Kinerja Sasaran	Program/ Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Efisiensi
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
Indeks Desa Membangun (IDM).	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	0	0 %	0	0	0	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3 Laporan	0 Laporan	0 %	0	0	0	

BAB 4

PENUTUP

Bab 4 Berisi :

1. Kesimpulan
2. Langkah Perbaikan Kinerja

4.1 Kesimpulan

Penyelenggaraan kegiatan pada Kecamatan Susukan Tahun 2025 merupakan tahun ke 5 (Lima) dari Rencana Strategis Kecamatan Susukan Tahun 2019-2025, Keberhasilan yang di capai berkat kerjasama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak. hasil laporan kinerja Kecamatan Susukan Tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

Dari 3 sasaran, yaitu yang pertama Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan dengan indikatornya Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat, persentase capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2025 adalah 82%, yang kedua Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Ketertiban Umum di Kecamatan, dengan indikatornya persentasi jumlah pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan umum dan ketertiban umum yang dilaksanakan, persentase capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2025 adalah 75 %, dan yang ketiga Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat, dengan indikatornya Indeks Desa Membangun (IDM), Persentase capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2025 adalah 0.81 Ponit.

4.2. Langkah Perbaikan Kinerja

Secara umum, pencapaian target tidak mengalami kendala yang signifikan, meskipun demikian masih terdapat permasalahan yang dapat menghambat peningkatan kinerja. Langkah- langkah perbaikan yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat
2. Menganggarkan sarana dan prasarana pelayanan umum
3. Memperbaiki Bangunan / Gedung kantor
4. Meningkatkan kemampuan ASN dengan mengikuti Bimtek atau Pelatihan
5. Memperbaharui SOP Pelayanan Umum
6. Meningkatkan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

7. Melaksanakan Pembinaan tentang Tugas Pokok dan Fungsi Aparatur Pemerintahan Desa
8. Meningkatkan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa
9. Mengadakan Sosialisasi tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa
10. Meningkatkan Keamanan di wilayah Kecamatan
11. Mendorong peningkatan Status Desa menjadi Desa Mandiri
12. Melakukan Pembinaan bagi Peserta MTQ tingkat Kabupaten
13. Memperkuat Fungsi Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (FORKOPIMCAM)

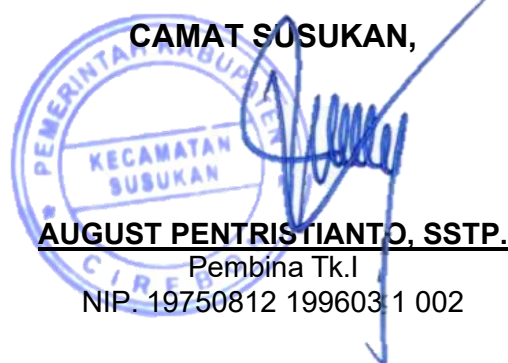
Melalui Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Kecamatan Susukan diharapkan dapat memberikan penjelasan dan gambaran kepada semua pihak yang membutuhkan informasi kinerja Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon untuk Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya LKIP Kecamatan Susukan ini diharapkan dapat memberikan motivasi bagi unit kerja lain khususnya Kecamatan Susukan untuk meningkatkan kinerjanya dalam mencapai program-program kegiatan pada masa yang akan datang sesuai dengan yang dicita-citakan pada visi, misi dan strategi/kebijakan organisasi.

Semoga LKIP Kecamatan Susukan diharapkan dapat bermanfaat untuk mendukung pembangunan daerah di Kabupaten Cirebon.

Susukan, Februari 2026

CAMAT SUSUKAN,



AUGUST PENTRISTIANTO, SSTP.

Pembina Tk.I

NIP. 19750812 199603 1 002